

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistika Kota Semarang,2019. Jumlah Penduduk Kota Semarang pada Tahun 2019. Kota Semarang : Badan Pusat Statistik
- Cendekia, I. (2003). Metode fasilitasi pembuatan keputusan partisipatif. PATTIRO.
- Data pengaduan *Call Center* 112 Kota Semarang periode Januari - Maret 2020
- Fuady, M. and A. Gunarsa (2010). Konsep negara demokrasi, Refika Aditama.
- Gusmayadi, A. P. (2019). Pengaruh Koordinasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, Perpustakaan.
- Iskandar, I. (2016). "Implementasi Teori Hirarki Kebutuhan Abraham Maslow Terhadap Peningkatan Kinerja Pustakawan." *Khizanah al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan* 4(1): 24-34
- Karyana, A. (2012). Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten Bangka. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 3(1).
- Keputusan WaliKota Semarang tentang Pembentukan Tim Terpadu Koordinasi Panggilan Darurat *Call Center* 112 Kota Semarang
- Latuconsina, Z. (2014). "Afirmasi Kebijakan Pemerintah dalam Fasilitasi Kerja bagi Penyandang Disabilitas." *Pandecta: Research Law Journal* 9(2): 207-215.
- Laporan Tahunan *Call Center* 112 Kota Semarang Tahun 2018
- Laporan Tahunan *Call Center* 112 Kota Semarang Tahun 2019
- Liputan6.com. (2019.2 Maret). Kemkominfo Perluas Panggilan Darurat di 33 Daerah di Indonesia.Diakses pada 14 Maret 2020 dari <https://www.liputan6.com/tekno/read/3928209/kemkominfo-perluas-panggilan-darurat-di-33-daerah-di-indonesia>
- Mahfud, M. A. Z. (2015). "Peran dan Koordinasi Stakeholder dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar." *Jurnal Administrasi Publik* 3(12): 2070-2076.
- Mooney, J. D. (1947). *The principles of organization*, New York, Harper.
- Muhtar, E. A., Ningrum, S., & Muhafidin, D. (2001). Pelaksanaan Koordinasi Eksternal Oleh Kepala Kantor Bkkbn Dalam Upaya Meningkatkan

Program Takesra/Kukesra Daerah Non Idt Di Kec. Warung Kondang Kab. Dt. Ii Cianjur. *Sosiohumaniora*, 3(3), 166.

- Nazir, M. (1988). "Metode Penelitian." Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ndraha, T. (2000). "Ilmu Pemerintahan (Kybernology)." Jakarta, Rineka Cipta.
- NtuHadi, S. (2017). "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi." *Jurnal Ilmu Pendidikan* 22(1).
- Nurhidayat, M., et al. (2013). "Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah Dalam Pelayanan E-Ktp Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar." *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3(2).
- Pemerintah Kota Semarang, (November.21.2019). Semarang Raih Penghargaan "Pelaksana Program Layanan Nomor Panggilan Darurat *Call Center* 112 Inovatif Tahun 2019. Diakses melalui tautan : https://semarangkota.go.id/p/1490/semarang_raih_penghargaan
- Pemerintah Kota Semarang, (Oktober16.2019).Launcing Penambahan Fitur Baru *Call Center* 112. Diakses melalui tautan : http://semarangkota.go.id/p/1428/pemkot_semarang_launcing_penambahan_fitur_baru_call_center_112
- Peraturan WaliKota Semarang No. 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan layanan nomor tunggal panggilan darurat 112
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanganan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 10 Tahun 2016 tentang layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat
- Purnomo, H. (2007). "Peran Pemerintah, Organisasi Kemanusiaan dan Grassroot dalam Manajemen Bencana." *Equilibrium Jurnal bisnis dan Akuntansi Fakultas Ekonomi UKRIM Yogyakarta* 1(1):
- Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi , Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang tahun 2019
- Rizka F.(2009). Rancangan Lokasi Asembly Point di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia tersedia dari <http://lib.ui.ac.id/>
- Sanjaya, A., et al. "Semarang Hebat."
- Sari, D. P. (2016). Analisis Koordinasi Dinas Perhubungan Dalam Penyediaan Jasa Transportasi Angkutan di Kabupaten Aceh Tenggara, Universitas

MedanArea.

- Sidik, M. (2002). Perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai pelaksanaan desentralisasi fiskal. Makalah Seminar Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah.
- Soekanto, S. (2002). Teori Peran, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sumiati, E. (2015). Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mempertahankan Kearifan Lokal: Etnografi Pada Masyarakat Adat Kampung Cireundeu Kota Cimahi, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Suprapti, K. D. and F. Nashori (2007). "Hubungan Antara Kebutuhan Rasa Aman Dengan Partisipasi Politik Pada Kader Partai." *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi*.
- Suri, N. K. (2016). "Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo dalam upaya penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo." *PERSPEKTIF* 5(1).
- Syafiie, I. K. (2011). "Manajemen pemerintahan."
- Tegila, R. (2015). "Peranan Camat sebagai Koordinator dalam Menunjang Keberhasilan Pembangunan Fisik di Kecamatan Bolangitang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara." *JURNAL POLITICO* 2(6).
- Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Yusri, A. and S. Harun (2016). "Koordinasi antara Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Rokan Hilir tahun 2010-2013." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau* 3(1).
- Yustisia, T. V. (2015). Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, VisiMedia.
- Zuhri, S. (2020). "Pelayanan Informasi Akun Instagram Call 112 Surabaya." *Public Administration Journal of Research* 2(1).